

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional dan Regional Provinsi Sulawesi Selatan. Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Sidenreng Rappang yang melaksanakan Program dan Kegiatan dalam Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari koridor kebijakan renstra yang saling berintegrasi satu dengan lainnya. Oleh karena itu suatu Kewajiban Perangkat Daerah (PD) dalam mewujudkan Visi, Misi, Program dan kemudian ditindaklanjuti pada Kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah (PD).

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi merupakan Satuan Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebagai perangkat otonomi daerah yang mempunyai visi dan misi sesuai kompetensi yang dimiliki serta koheren dengan visi misi Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk melaksanakan visi dan misi sebagaimana yang telah dituangkan dalam rencana kerja (Renja) yang dilaksanakan pada setiap tahunnya dalam rangka mengukur kinerja Organisasi dan sebagai tindaklanjut penjabaran dari Rencana Strategis Jangka Menengah (Lima Tahunan) yang capaian kinerjanya diukur setiap tahun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana kerja PD ditindaklanjuti dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah setiap tahunnya dan selanjutnya diproses dalam penyusunan RAPBD.

Target kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Tahun 2025 ini, menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja unit satuan kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi baik pada tingkat kegiatan dan merupakan pembandingan bagi proses pengukuran kinerja/keberhasilan unit Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi yang dilakukan pada setiap akhir tahun kinerja.

Sedangkan Rencana Kinerja pada Tahun 2025 bagi Unit Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi merupakan komitmen dan kontrak kerja yang harus dioptimalkan dalam proses pencapaian kinerjanya, sebagai bagian dari upaya pencapaian target kinerja, Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang pada Umumnya.

Dalam perkembangannya rencana kinerja yang telah disusun tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan perubahan. Perubahan ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

## **I.2. Landasan Hukum**

Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah (PD) khususnya lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah ( RPD ) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026;
  10. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang.
  11. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang nomor 30 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024

### **I.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada setiap Perangkat Daerah (PD), dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian perkembangan keadaan.

#### **I.4. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I P E N D A H U L U A N**

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Landasan Hukum
- I.3. Maksud dan Tujuan
- I.4. Sistimatika Penulisan

##### **BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisa Kinerja Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

- 4.1 Program dan Kegiatan

##### **BAB V P E N U T U P**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu**

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2024 sebagai bahan pembandingan pada pelaksanaan Renja tahun 2023, dimana pada tahun 2023 pelaksanaan Renja PD capaian prosentasenya sekitar 98,36 persen dan berdasarkan realisasi tersebut maka dapat dikatakan bahwa pencapaian yang optimal atau serapan anggaran cukup optimal. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi seyogyanya ditempuh langkah-langkah strategis yakni dengan memberikan arahan dan petunjuk serta memotivasi SDM agar dapat memacu serapan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan.

Disamping itu adanya penyesuaian program berdasarkan Renstra yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam menyusun program pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan dapat meningkatkan capaian prosentase pelaksanaan Renja PD pada tahun 2025. Sebagai bahan evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.29

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANBG s.d. TAHUN 2024**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target kinerja capaian Renstra Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s.d. dengan tahun 2022 (Tahun 2021+2022)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2023)			Target Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun berjalan (2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s.d. tahun berjalan (2024)	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian(%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	7,50	57,1	6,92	6,92	100,0%	7,00	0	0,00%
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang diawasi	40,00	57,2	35,71	35,71	100,0%	37,00	0	0,00%

	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30,00	21	21	21	100,0%	20,00	0	0,00%
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi aktif	10,67	8,1	8,2	8,2	100,0%	10,65	0	0,00%
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Kegiatan Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anggota koperasi yang dilatih	6,90	1	1	1	100,0%	6,70	0	0,00%
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Sub keg Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	25,00	12	12	12	100,0%	15,00	0	0,00%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	60,00	75,1	75,2	75,2	100,0%	50,00	0	0,00%
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan	Persentase usaha mikro yang diberdayakan	1,25	20	24,0	24,0	100,0%	1,20	0	0,00%

	Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan									
	Sub keg Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	25,00	100	100	100	100,0%	50,00	0	0,00%
	Sub keg Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	100,00	0	-	-	0,0%	250,00	0	0,00%
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat volume usahanya setelah difasilitasi pengembangan	3,50	91,99	91,9	91,9	100,0%	2,50	0	0,00%
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang difasilitasi pengembangan	1,40	1	1,0	1,0	100,0%	1,40	0	0,00%

	Sub keg Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	30,00	2	2	2	100,0%	30,00	0	0,00%
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	30,00	100	100	100	100,0%	28,00	0	0,00%
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pelaksanaan pelatihan	16,00	46	47	47	100,0%	30,00	0	0,00%
	Sub keg Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	330,00	500	500	500	100,0%	630,00	0	0,00%
	Sub Keg. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1,00	5	5	5	100,0%	1,00	0	0,00%
	Kegiatan Pemnbinan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Swasta yang dibina	10,20	0	-	-	0,0%	10,20	0	0,00%
	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Swasta yang dibina	10,00	0	-	-	0,0%	10,00	0	0,00%

	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	4,60	91,1	91,2	91,2	100,0%	4,50	0	0,00%
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Besaran pemeriksaan perusahaan	0,50	22	23,0	23,0	100,0%	0,43	0	0,00%
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	30,00	27	29	29	100,0%	20,00	0	0,00%
	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	28,50	100	100,0	100,0	100,0%	28,00	0	0,00%

	Sub keg Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	7.199,00	5018	5.018	5.018	100,0%	7199,00	0	0,00%
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase fasilitasi pembangunan kawasan transmigrasi	100,00	2,1	2,3	2,3	100,0%	100,00	0	0,00%
	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen kelayakan lingkungan dan pemukiman transmigrasi	20,00	75,8	75,3	75,3	100,0%	15,00	0	0,00%
	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1,00	3	3	3	100,0%	1,00	0	0,00%
	sub keg Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	20,00	0	-	-	0,0%	30,00	0	0,00%
	sub keg Pelatihan transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	15,00	0	-	-	0,0%	40,00	0	0,00%

	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase kawasan transmigrasi yg dikembangkan	100,00	24,2	24,7	24,7	100,0%	100,00	0	0,00%
	Sub keg Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	4,00	45	46	46	100,0%	4,00		
	Sub keg Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	15,00	0	-	-	0,0%	20,00	-	0,00%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	100	100	100	100,0%	100,00	0	0,00%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	100	100	100	100,0%	100,00	0	0,00%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,00	3	3	3	100,0%	3,00	0	0,00%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,00	1	3	3	100,0%	3,00	0	0,00%
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	100	100	100	100,0%	100,00	0	0,00%

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33,00	35	33	33	100,0%	462,00	66	200,00%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	230,00	155	345	345	100,0%	200,00	0	0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17,00	17	17	17	100,0%	17,00	0	0,00%
	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	10	100	100	100,0%	100,00	0	0,00%
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33,00	35	33	33	100,0%	33,00	0	0,00%
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	33,00	35	-	-	0,0%	33,00	0	0,00%
	Kegiatan:Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	100	100	100	100,0%	100,00	0	0,00%

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17,00	22	17	17	100,0%	17,00	0	0,00%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	200,00	260	230	230	100,0%	200,00	0	0,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65,00	140	100	100	100,0%	15,00	0	0,00%
	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	100	100	100	100,0%	100,00	0	0,00%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4,00	0	10	10	100,0%	1,00	0	0,00%
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3,00	0	-	-	0,0%	1,00	0	0,00%
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100,00	100	100	100	100,0%	100,00	0	0,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36,00	12	12	12	100,0%	12,00	2	5,56%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	36,00	12	12	12	100,0%	12,00	0	0,00%

		Kantor yang Disediakan								
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	100	100	100	100,0%	100,00	0	0,00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12,00	13	12	12	100,0%	12,00	0	0,00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18,00	18	16	16	100,0%	15,00	0	0,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00	0	1	1	100,0%	1,00	0	0,00%

Dari tabel TC 29 di atas terlihat bahwa sebagian besar indikator telah sesuai target. Namun ada beberapa indikator baru yang digunakan dalam renstra 2024 – 2026 sehingga belum dilaksanakan pengukurannya pada tahun 2022 dan 2023.

## **II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Secara kelembagaan Perangkat Daerah (PD) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah. Untuk mengukur Kinerja Pelayanan PD, maka dapat dilakukan dengan mengimplementasikan metode Analisa Lingkungan Strategis, Analisa Lingkungan Internal dan Analisa Lingkungan Eksternal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diamanatkan oleh lembaga Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi serta norma dan standar pelayanan PD, memerlukan :

### **II.1.1. Lingkungan Strategis**

Pengertian Lingkungan Strategis adalah faktor yang berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Organisasi Unit Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, Lingkungan Strategis dibagi dua yaitu Instrumental Input dan Environmental Input. Environmental Input berkaitan dengan kebijakan atau Political Will dan faktor eksternal yang merupakan faktor yang tidak dapat diubah melainkan disiasati apabila berbentuk ancaman. Demikian pula dengan lingkungan strategis dianalisis berdasarkan instrumental serta environmental input.

### **II.1.2. Analisa Lingkungan Intenal**

Lingkungan Internal merupakan Variabel lingkungan yang berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan kinerja pada Unit Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang yang dalam batas-batas tertentu yang dapat dikendalikan dalam rangka mewujudkan tujuan/sasaran Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.

Selain itu, tersedianya Sumber Daya Manusia/Aparatur serta Sumber Daya Material berupa sarana dan prasarana kerja yang dimiliki Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi saat ini, meskipun masih jauh memadai, namun tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan dukungan dan motivasi kerja aparatur yang bertugas pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.

### **II.1.3. Analisa Lingkungan Eksternal**

Lingkungan Eksternal Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah salah satu Variabel yang turut mempengaruhi optimalisasi pencapaian kinerja aparatur, akan tetapi pengelolaan atau pengendaliannya diluar kendali Unit Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, jika faktor lingkungan eksternal ini mempunyai pengaruh atau berdampak negatif terhadap optimalisasi pencapaian kinerja aparatur maka harus dapat disiasati dalam rangka mendukung kelancaran dan meningkatkan kinerja unit Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang.

Khususnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Sidenreng Rappang pada umumnya, terutama yang berkaitan dengan cara menyikapi desentralisasi kewenangan dalam hal pembinaan dan pengembangan di bidang Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi serta hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal Pembangunan dan secara umum dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C30  
 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI  
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>
	<b>BIDANG KOPERASI</b>											
1	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas		✓	6,92	7	7,3	7,5	0	0	0	0	
2	Persentase koperasi yang diawasi			36,62	37	38	40,00	0	0	0	0	
3	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			20	20	25	30	20	0	0	0	
4	Persentase koperasi aktif		✓	10,64	10,65	10,66	10,67	10,64	0	0	0	
5	Persentase anggota koperasi yang dilatih			6,65	6,7	6,8	6,9	6,65	0	0	0	
6	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian			15	15	20	25	25	0	0	0	
	<b>BIDANG UMKM</b>											
7	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha		✓	45	50	55	60	0	0	0	0	

8	Persentase usaha mikro yang diberdayakan		□	1,05	1,2	1,25	1,25	1,05	0	0	0
9	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro			327	50	25	25	327	0	0	0
10	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan			216	250	100	100	216	0	0	0
11	Persentase usaha mikro yang meningkat volume usahanya setelah difasilitasi pengembangan		✓	2	2,5	3	4	2	0	0	0
12	Persentase usaha mikro yang difasilitasi pengembangan			0,64	1,4	1,4	1,4	1,4	0	0	0
13	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi			198	30	30	30	30	0	0	0
	<b>BIDANG TENAGA KERJA</b>								0	0	0
14	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi		✓	26,78	28	29	30	26,78	0	0	0
15	Persentase pelaksanaan pelatihan			40	30	16	16	40	0	0	0
16	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n			185	630	330	330	185	0	0	0
17	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja			4	1	1	1	4	0	0	0

18	Persentase Lembaga Pelatihan Swasta yang dibina			0	10,2	10,2	10,2	0	0	0	0
19	Jumlah Lembaga Pelatihan Swasta yang dibina			0	10	10	10	0	0	0	0
20	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKSBipartit, Struktur Skala Upah , dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	✓		14,46	4,5	4,55	5	4,46	0	0	0
21	Besaran pemeriksaan perusahaan			0,41	0,43	0,45	0,5	0,41	0	0	0
22	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan			20	20	30	30	20	0	0	0
23	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek			27,89	28	28,2	28,5	27,89	0	0	0
24	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			7091	7199	7199	7199	7199	0	0	0
	<b>BIDANG TRANSMIGRASI</b>								0	0	0
25	Persentase fasilitasi pembangunan kawasan transmigrasi	✓		100	100	100	100	100	0	0	0
26	Persentase dokumen kelayakan lingkungan dan pemukiman transmigrasi			10	15	20	20	10	0	0	0

27	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)			3	1	1	1	3	0	0	0
28	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan			0	30	20	20	0	0	0	0
29	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan			0	40	15	15	0	0	0	0
30	Persentase kawasan transmigrasi yg dikembangkan	✓		100	100	100	100	100	0	0	0
31	Jumlah Satuan Permukiman yang dibina			4	4	4	4	4	0	0	0
32	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan			1	1	1	1	0	0	0	0
	<b>SEKRETARIAT</b>								0	0	0
33	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	✓		100	100	100	100	100	0	0	0
34	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100	100	100	100	100	0	0	0
35	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3	3	3	3	3	0	0	0
36	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1	3	3	3	1	0	0	0

37	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	100	100	100	100	0	0	0
38	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			462	462	462	462	35	0	0	0
39	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			155	200	230	230	155	0	0	0
40	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			17	17	17	17	17	0	0	0
41	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100	100	100	100	100	0	0	0
42	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			35	33	33	33	35	0	0	0
43	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			35	33	33	33	35	0	0	0
44	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	100	100	100	100	0	0	0
45	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			22	17	17	17	22	0	0	0

46	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			260	200	200	200	260	0	0	0
47	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			140	15	60	65	140	0	0	0
48	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	100	100	100	100	0	0	0
49	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			7	1	4	4	0	0	0	0
50	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			0	1	3	3	0	0	0	0
51	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			100	100	100	100	100	0	0	0
52	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12	12	12	12	12	0	0	0
54	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12	12	12	12	12	0	0	0
55	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	100	100	100	100	0	0	0
56	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			13	12	12	12	13	0	0	0

57	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			18	15	18	18	18	0	0	0	
58	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0	1	1	1	0	0	0	0	

### II.3. Isu-Isu Penting Tugas dan Fungsi SKPD

Untuk merumuskan isu-isu strategis dalam memproyeksikan kondisi yang diharapkan kedepan dalam kaitannya dengan bidang tugas Unit Satuan Kerja Dinas Koperasi UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan dengan mengimplementasikan metode analisis SWOT (Streng, Weakness, Opportunities dan Thtreats). Isu tersebut akan memiliki arti fungsional apabila dibahas dalam kaitannya dengan kondisi realitas Organisasi. Isu penting yang berkaitan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD merupakan kenyataan yang menggambarkan keadaan atau realitas tentang sebuah pokok permasalahan, agar memudahkan dalam mengorganisir isu, maka dilakukan identifikasi. Hasil identifikasi isu dapat diuraikan seperti tabel di bawah ini ;

#### Matriks Internal Strategi Faktor Analisis Sistem

Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
➤ Adanya Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang	➤ Jumlah Aparatur Pembina Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif relatif masih sangat minim.
➤ Adanya komitmen dan motivasi kerja yang tinggi, di kalangan aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.	➤ Sarana Prasarana Kerja dalam rangka pembinaan Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, relatif masih kurang memadai.

## Matriks Eksternal Strategi Faktor Analisis Sistem

Peluang (O)	Ancaman (T)
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Adanya Komitmen yang kuat dari Pemerintah Pusat dan Daerah untuk memberikan stimulus bagi pelaku UMKM dalam menghadapi krisis ekonomi akibat konflik antar negara;</li> <li>➤ Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan Daerah dalam menekan tingkat pengangguran</li> <li>➤ Masih luasnya lahan untuk dijadikan daerah transmigrasi.</li> <li>➤ Adanya struktur masyarakat yang memiliki jiwa kewirausahaan serta budaya kerja yang ulet dan religius (Megetteppa na malempu).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ancaman krisis ekonomi global akibat konflik Rusia – Ukraina dan konflik Palestina yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi rakyat</li> <li>➤ Terbatasnya daya serap Koperasi dan UMKM memanfaatkan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR)</li> </ul>

### II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD sangat dibutuhkan dalam merumuskan perencanaan baik pemerintahan, pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan program dan kegiatan yang matang dan tentunya bermamfaat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Sistem Perencanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan dikenal dengan adanya Perencanaan sebagai berikut :

1. Perencanaan dari bawah ke atas (bottom up planning) artinya memungkinkan menggali ide-ide dan gagasan masyarakat sangat dibutuhkan dalam perencanaan. Sistem perencanaan dengan metode tersebut dilaksanakan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat desa/kelurahan dan kecamatan.
2. Perencanaan metode dari atas kebawah (top down planning) untuk memungkinkan terjadinya perpaduan antara perumusan Kebijakan Pemerintah dan Keinginan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan terjadinya proses tersebut, maka kita membandingkan antara Rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan masyarakat, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T.C31  
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAS I</b>				8.266.688.727	<b>DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAS I</b>				10.599.892.000	
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Sidrap	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	7,30	25.000.000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Sidrap	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	7,30	30.000.000	
2	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Sidrap	Persentase koperasi yang diawasi	38,00	25.000.000	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Sidrap	Persentase koperasi yang diawasi	38,00	30.000.000	

3	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Sidrap	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	25,00	25.000.000	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Sidrap	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	25,00	30.000.000
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Sidrap	Persentase koperasi aktif	10,66	20.000.000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Sidrap	Persentase koperasi aktif	10,66	20.000.000
5	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Kegiatan Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sidrap	Persentase anggota koperasi yang dilatih	6,80	20.000.000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Kegiatan Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sidrap	Persentase anggota koperasi yang dilatih	6,80	20.000.000
6	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Sub keg Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Sidrap	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	20,00	20.000.000,00	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Sub keg Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Sidrap	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	20,00	20.000.000,00

7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Sidr ap	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	55,00	1.100.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Sidr ap	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	55,00	640.000.000
8	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Sidr ap	Persentase usaha mikro yang diberdayakan	1,25	1.100.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Sidr ap	Persentase usaha mikro yang diberdayakan	1,25	640.000.000
9	Sub keg Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Sidr ap	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	25,00	1.000.000.000	Sub keg Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Sidr ap	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	25,00	200.000.000
10	Sub keg Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Sidr ap	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	100,00	100.000.000	Sub keg Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Sidr ap	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	100,00	440.000.000

	melalui Pendidikan dan Pelatihan					melalui Pendidikan dan Pelatihan					
1 1	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Sidr ap	Persentase usaha mikro yang meningkat volume usahanya setelah difasilitasi pengembangan	3,00	1.000.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Sidr ap	Persentase usaha mikro yang meningkat volume usahanya setelah difasilitasi pengembangan	3,00	1.700.000.000	
1 2	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Sidr ap	Persentase usaha mikro yang difasilitasi pengembangan	1,40	1.000.000.000	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Sidr ap	Persentase usaha mikro yang difasilitasi pengembangan	1,40	1.700.000.000	
1 3	Sub keg Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Sidr ap	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	30,00	1.000.000.000	Sub keg Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Sidr ap	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	30,00	1.000.000.000	

14	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Sidrap	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	29,00	550.000.000	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Sidrap	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	29,00	1.200.000.000
15	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Sidrap	Persentase pelaksanaan pelatihan	16,00	450.000.000	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Sidrap	Persentase pelaksanaan pelatihan	16,00	800.000.000
16	Sub keg Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Sidrap	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	330,00	400.000.000	Sub keg Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Sidrap	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	330,00	750.000.000
17	Sub Keg. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Sidrap	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1,00	50.000.000	Sub Keg. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Sidrap	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1,00	50.000.000
18	Kegiatan Pemnbinan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Sidrap	Persentase Lembaga Pelatihan Swasta yang dibina	10,20	100.000.000	Kegiatan Pemnbinan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Sidrap	Persentase Lembaga Pelatihan Swasta yang dibina	10,20	400.000.000
19	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Sidrap	Jumlah Lembaga Pelatihan Swasta yang dibina	10,00	100.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Sidrap	Jumlah Lembaga Pelatihan Swasta yang dibina	10,00	400.000.000

20	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Sidrap	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	4,55	1.269.453.000	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Sidrap	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	4,55	1.295.000.000
21	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sidrap	Besaran pemeriksaan perusahaan	0,45	20.000.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sidrap	Besaran pemeriksaan perusahaan	0,45	20.000.000
22	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Sidrap	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	20,00	20.000.000,00	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Sidrap	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	20,00	20.000.000,00

2 3	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Sidr ap	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	28,20	1.249.453.000	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Sidr ap	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	28,20	1.275.000.000	
2 4	Sub keg Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Sidr ap	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	7.199,00	1.249.453.000	Sub keg Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Sidr ap	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	7.199,00	1.275.000.000	
2 5	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Sidr ap	Persentase fasilitasi pembangunan kawasan transmigrasi	100,00	140.000.000	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Sidr ap	Persentase fasilitasi pembangunan kawasan transmigrasi	100,00	180.000.000	
2 6	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sidr ap	Persentase dokumen kelayakan lingkungan dan pemukiman transmigrasi	20,00	140.000.000	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sidr ap	Persentase dokumen kelayakan lingkungan dan pemukiman transmigrasi	20,00	180.000.000	

27	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Sidrap	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1,00	100.000.000,00	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Sidrap	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1,00	100.000.000,00
28	sub keg Penyuluhan Transmigrasi	Sidrap	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	20,00	20.000.000	sub keg Penyuluhan Transmigrasi	Sidrap	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	20,00	30.000.000
29	sub keg Pelatihan transmigrasi	Sidrap	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	15,00	20.000.000	sub keg Pelatihan transmigrasi	Sidrap	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	15,00	50.000.000
30	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Sidrap	Persentase kawasan transmigrasi yg dikembangkan	100,00	20.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Sidrap	Persentase kawasan transmigrasi yg dikembangkan	100,00	20.000.000
31	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Sidrap	Jumlah Satuan Permukiman yang dibina	4,00	20.000.000	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Sidrap	Jumlah Satuan Permukiman yang dibina	4,00	20.000.000

3 2	Sub keg Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Sidr ap	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	10,00	10.000.000,00	Sub keg Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Sidr ap	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	10,00	10.000.000,00	
3 3	Sub keg Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Sidr ap	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1,00	10.000.000,00	Sub keg Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Sidr ap	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1,00	10.000.000,00	
3 4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sidr ap	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	3.142.235.727	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sidr ap	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	3.814.892.000	
3 5	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sidr ap	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	14.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sidr ap	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	14.000.000	
3 6	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sidr ap	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,00	7.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sidr ap	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,00	7.000.000	
3 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sidr ap	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,00	7.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sidr ap	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,00	7.000.000	

38	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sidrap	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	2.731.835.727	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sidrap	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	3.247.392.000
39	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sidrap	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33,00	2.718.835.727	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sidrap	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33,00	3.234.392.000
40	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sidrap	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	230,00	8.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sidrap	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	230,00	8.000.000
41	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sidrap	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17,00	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sidrap	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17,00	5.000.000
42	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sidrap	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	9.000.000	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sidrap	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	9.000.000

4 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sidrap	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33,00	5.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sidrap	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33,00	5.000.000	
4 4	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sidrap	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	33,00	4.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sidrap	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	33,00	4.000.000	
4 5	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sidrap	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	106.500.000	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sidrap	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	106.500.000	
4 6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sidrap	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17,00	1.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sidrap	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17,00	1.500.000	
4 7	Fasilitas Kunjungan Tamu	Sidrap	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	200,00	5.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Sidrap	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	200,00	5.000.000	
4 8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sidrap	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60,00	100.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sidrap	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60,00	100.000.000	

49	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sidr ap	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	38.500.000	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sidr ap	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	45.000.000	
50	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sidr ap	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4,00	28.500.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sidr ap	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4,00	30.000.000	
51	Pengadaan Mebel	Sidr ap	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3,00	10.000.000	Pengadaan Mebel	Sidr ap	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3,00	15.000.000	
52	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Sidr ap	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100,00	147.400.000	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Sidr ap	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100,00	267.000.000	
53	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sidr ap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	45.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sidr ap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	90.000.000	
54	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sidr ap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	102.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sidr ap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	177.000.000	

5 5	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sidr ap	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	95.000.000	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sidr ap	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	126.000.000
5 6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sidr ap	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12,00	70.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sidr ap	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12,00	96.000.000
5 7	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sidr ap	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18,00	15.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sidr ap	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18,00	15.000.000
5 8	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sidr ap	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	1,00	10.000.000	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sidr ap	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	1,00	15.000.000

## **II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan dikenal dua arah, yaitu Top Down Planning dan Bottom Up Planning, kedua Sistem tersebut sering digunakan dalam perencanaan pembangunan di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini dimaksudkan agar terjadi perpaduan antara perumusan Kebijakan Pemerintah dan keinginan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan, Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan untuk saling bersinergi satu dengan lainnya.

Dalam pelaksanaannya dilakukan setiap tahun sebagai penjabaran Pembangunan Lima Tahunan dan mulai dilakukan pada tingkat Desa/Kelurahan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan) yang melibatkan Stakeholders, kemudian ditindaklanjuti pada tingkat kecamatan. Musrenbang tersebut kemudian dirumuskan pada tingkat Kabupaten sebagai Program Unit Kerja SKPD Tahunan, Pelaksanaan Musrenbang baik tingkat Desa/Kelurahan dan tingkat Kecamatan dimaksudkan menampung aspirasi masyarakat sebagai pencerminan azas keadilan dan pemerataan, agar masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan disegala aspek secara berkesinambungan (sustainable).

Usulan Program masyarakat Desa/Kelurahan dapat kita tampung pada tingkat SKPD. Tidak semua usulan program masyarakat dapat diterima oleh karena tidak sejalan apa yang kita programkan dan terbatasnya anggaran Pemerintah Kabupaten, yang dialokasikan pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan keterbatasan dana tersebut.

Tabel II. 4  
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	PAGU INDIKATIF (Rp)	CATATAN
<b>I.</b>	<b><i>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</i></b>					
	Sub keg Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				300.000.000	
1	Pelatihan dan pengadaan peralatan Pertukangan	kelurahan Majjelling, Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1 Klp	50.000.000	Hasil Musrembang tahun 2024
2	Pelatihan dan Pengadaan Mesin Jahit	kelurahan majjelling, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 Klp	50.000.000	sda
3	Pelatihan dan Pengadaan Kecantikan	kelurahan majjelling, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 Klp	50.000.000	sda
4	Pelatihan dan Pengadaan Kecantikan	kelurahan majjelling, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 Klp	50.000.000	sda
5	Pelatihan dan Pengadaan Kecantikan	kelurahan majjelling, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 Klp	50.000.000	sda
6	Pelatihan dan Pengadaan Kecantikan	kelurahan majjelling, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 Klp	50.000.000	sda
						sda
<b>II.</b>	<b><i>Program Pengembangan UMKM</i></b>					
	<b>Sub Kegiatan Peningkatan sarana produksi UMKM</b>				1.650.000.000	

1	Pengadaan Mesin Jahit Kelompok Terkini	Lingkungan Panreng Rijang Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kab. Sidrap, Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1 paket	10.000.000	Hasil Musrembang tahun 2024
2	Pengadaan Masin Jahit Kelompok Mawar	Lingkungan Panreng Rijang Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kab. Sidrap, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 paket	10.000.000	sda
3	Pengadaan mesin kemasan	Desa Mario, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 paket	10.000.000	sda
4	Pengadaan mesin jahit	kelurahan batu, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 paket	10.000.000	sda
5	Pengadaan alat pertukangan kayu	keluraha batu, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 paket	10.000.000	sda
6	Pengadaan mesin jahit	Desa Lainungan, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 paket	10.000.000	sda
7	Pengadaan peralatan usaha	DUSUN I KUNDALA DAN DUSUN II LARUA , Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 paket	10.000.000	sda
8	Pengadaan peralatan Tata Boga	Lingkungan I dan Lingkungan II, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 paket	10.000.000	sda
9	Pengadaan peralatan usaha	DESA LEPPANGENG, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 paket	10.000.000	sda
10	Pengadaan peralatan usaha	DESA LEPPANGENG, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 paket	10.000.000	sda
11	Pengadaan peralatan usaha	DUSUN I Jambu-Jambu, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 paket	10.000.000	sda

12	Pengadaan peralatan usaha	Buntu Buangin, Kab. Sidenreng Rappang	sda	3 paket	30.000.000	sda
13	Pengadaan peralatan pertukangan kayu	LINGKUNGAN BENTENG, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 paket	10.000.000	sda
14	Pengadaan mesin jahit	Kel. Rappang Kec. Panca rijang, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 paket	10.000.000	Pokir tahun 2024
15	Pengadaan peralatan usaha	Desa Lise, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 paket	10.000.000	sda
16	Pengadaan peralatan Tata Boga	Desa Maddenre, Desa Kulo Kec Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	sda	2 paket	20.000.000	sda
17	Pengadaan peralatan perbengkelan	Desa Kulo, Desa Maddenra, Desa Abbokongan Kec. Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	sda	3 paket	30.000.000	sda
18	Pengadaan peralatan pertukangan	Desa Kulo, Abbkongon, Maddenra Kec. Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	sda	3 paket	30.000.000	sda
19	Pengadaan tenda	Desa Mattirotasi, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 paket	15.000.000	sda
20	Pengadaan peralatan usaha	KECAMATAN MARITENGGAE DAN KECAMATAN WATANG SIDENRENG, Kab. Sidenreng Rappang	sda	10 paket	100.000.000	sda
21	Pengadaan peralatan usaha	Tersebar di dua kecamatan (Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	sda	10 paket	100.000.000	sda
22	Pengadaan peralatan usaha	Kecamatan Baranti, Kulo dan Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang	sda	10 paket	100.000.000	sda
23	Pengadaan peralatan usaha	Kecamatan Dua Pitue, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 paket	15.000.000	sda
24	Pengadaan peralatan usaha	TERSEBAR DI 3 KECAMATAN TELLU LIMPOE,PANCA LAUTANG,WATTANG PULU, Kab. Sidenreng	sda	20 paket	150.000.000	sda

		Rappang				
25	Pengadaan Gurinda	Lingkungan 2 Kel. pajelele, Kab. Sidenreng Rappang	sda	200 uint	150.000.000	sda
26	Pengadaan mesin jahit	Lingkungan 2 Kel. pajelele, Kab. Sidenreng Rappang	sda	10 unit	50.000.000	sda
27	Pengadaan peralatan pertukangan	Kelurahan Massepe dan Kelurahan Pajelele, Kab. Sidenreng Rappang	sda	20 paket	20.000.000	sda
28	Pengadaan peralatan usaha	KECAMATAN PANCA RIJANG DAN KECAMATAN BARANTI, Kab. Sidenreng Rappang	sda	20 paket	150.000.000	sda
29	Pengadaan peralatan usaha	KECAMATAN PITURIASE, KECAMATAN PITURIAWA, KECAMATAN DUAPITTUE , Kab. Sidenreng Rappang	sda	20 paket	150.000.000	sda
30	Pengadaan peralatan usaha	Tersebar 3 kecamatan (Baranti, Panca rijang dan Kulo), Kab. Sidenreng Rappang	sda	10 paket	100.000.000	sda
31	Pengadaan peralatan usaha	Kecamatan Panca Rijang, Kulo, dan Baranti, Kab. Sidenreng Rappang	sda	10 paket	50.000.000	sda
32	Pengadaan peralatan usaha	kecamatan Kulo, Panca Rijang, dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	sda	10 paket	100.000.000	sda
33	Pengadaan peralatan usaha	tersebar Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	sda	10 paket	100.000.000	sda
34	Pengadaan peralatan usaha	tersebar Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	sda	20 unit	50.000.000	sda
<b>III.</b>	<b>Program Perberdayaan UMKM</b>					

	<b>Sub keg Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan</b>				440.000.000	
1	Pelatihan wirausaha	Lingkungan I dan II Lawawoi, Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	2 klp	20.000.000	Hasil Musrembang tahun 2024
2	Pelatihan wirausaha	Desa Dengeng-Dengeng, Kab. Sidenreng Rappang		2 klp	20.000.000	sda
3	Pelatihan wirausaha	Dusun I Mamminasae, Kab. Sidenreng Rappang	sda	2 klp	20.000.000	sda
4	Pelatihan wirausaha	Dusun II Sudedo, Kab. Sidenreng Rappang	sda	2 klp	20.000.000	sda
5	Pelatihan wirausaha	Desa Lagading, Kab. Sidenreng Rappang	sda	3 klp	30.000.000	sda
6	Pelatihan Peningkatan Kapasitas UMKM	UMKM Mawar, Kelurahan Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	sda	3 klp	45.000.000	sda
7	Pelatihan Peningkatan Kapasitas UMKM	UMKM Padaidi, Kelurahan Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang		3 klp	45.000.000	sda
8	Pelatihan Peningkatan Kapasitas UMKM	Kecamatan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang		5 klp	50.000.000	sda
9	Pelatihan Peningkatan Kapasitas UMKM	TERSEBAR DI MARITENGGAE - WATANG SIDENRENG, Kab. Sidenreng Rappang		100 org	100.000.000	sda
10	Pelatihan Peningkatan Kapasitas UMKM	TERSEBAR DI PANCA RIJANG, BARANTI, KULO, Kab. Sidenreng Rappang		30 org	30.000.000	sda

11	Pelatihan Peningkatan Kapasitas UMKM	TERSEBAR DI PANCA RIJANG, BARANTI, KULO, Kab. Sidenreng Rappang		30 org	30.000.000	sda
12	Pelatihan Peningkatan Kapasitas UMKM	TERSEBAR DI WATANG PULU, PANCA LAUTANG DAN TELLU LIMPOE, Kab. Sidenreng Rappang		30 org	30.000.000	sda
	<b>Program pembangunan wilayah transmigrasi</b>				11.100.000.000	
1	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Kec. Pitu Riase	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1 paket	100.000.000	Hasil Musrembang tahun 2024
	Peningkatan ruas jalan existing transmigrasi lampiring - transmigrasi tanatoro	Kelurahan Batu dan Desa Tanatoro, Kab. Sidenreng Rappang		7 km	11.000.000.000	
	<b>Program pengembangan wilayah transmigrasi</b>					
2	<i>Sub keg Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman</i>				1.125.000.000	

	Bantuan Sarana Sosial Ekonomi Pada Kawasan Transmigrasi	Dusun III & IV Desa Lagading, Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	45 paket	1.125.000.000	Hasil Musrembang tahun 2024
--	---	--	---	----------	---------------	-----------------------------

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Pembangunan Nasional Lima Tahun (Jangka Menengah) merupakan bentuk kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, kemudian dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dalam pelaksanaannya dilakukan dua tahapan, yaitu APBN Awal dan APBN Perubahan. Dalam setiap penetapan APBN telah tertuang didalamnya berbagai Program lintas sektoral. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia telah memproyeksikan program serta mengakomodir usulan-usulan dari Daerah kemudian dirumuskan menjadi Program Nasional melalui Rakornas yang dilaksanakan setiap tahun.

Tema pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 adalah “Penguatan Daya Saing Daerah untuk Mendukung Transformasi Sosial dan Ekonomi’”, dengan sasaran diantaranya Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan tahun 2024, maka prioritas pembangunan pada RKP 2024 adalah peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat; penguatan sistem agrobisnis dalam mendukung pengembangan perekonomian daerah; peningkatan infrastruktur dasar dan ekonomi; peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan; perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik; penataan lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana; peningkatan aktivitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang religius, berbudaya, dan aman.

#### **III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi**

Tujuan Renja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 yang merupakan penjabaran Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melaksanakan penganggaran secara efektif, efisien dan terukur sebagai wujud pelaksanaan perencanaan, serta menitikberatkan pada pengembangan pelaku usaha mikro kecil menengah, koperasi; sehingga dapat memperluas kesempatan kerja dan mencegah peningkatan pengangguran dan

pengembangan kawasan transmigrasi demi terwujudnya kesejahteraan yang merata.

a. Tujuan Renja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM
- 2) Memperluas kesempatan kerja
- 3) Meningkatkan pengembangan wilayah transmigrasi

b. Sasaran Renja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi berdasarkan RPD Kabupaten Sidenreng Rappang dan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya produktivitas koperasi dan UMKM
- 2) Meningkatnya kompetensi tenaga kerja
- 3) Meningkatnya Pengembangan wilayah transmigrasi.
- 4) Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

c. Indikator Sasaran Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebagai berikut :

- 1). Rata-rata produktivitas Koperasi dan UMKM
- 2). Tingkat produktivitas tenaga kerja.
- 3). Persentase peningkatan sarana/prasarana di wilayah transmigrasi.
- 4). Nilai sakiip perangkat daerah

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

#### III.3. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang maka perlu disusun rencana kerja yang memuat sejumlah program dan kegiatan. Rencana kerja ini tidak terlepas dari rencana strategis yang telah ditetapkan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan dalam rencana strategis telah dipetakan ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai nomenklatur dalam permendagri dimaksud, namun masih terdapat beberapa program dan kegiatan yang belum kami temukan keselarasannya dan telah kami usulkan untuk dibuatkan penetapan terhadap program dan kegiatan tersebut.

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2025 merencanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut :

#### Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas
2	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang diawasi
3	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi aktif
5	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Kegiatan Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anggota koperasi yang dilatih

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR
6	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Sub keg Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha
8	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase usaha mikro yang diberdayakan
9	Sub keg Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro
10	Sub keg Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan
11	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat volume usahanya setelah difasilitasi pengembangan
12	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang difasilitasi pengembangan
13	Sub keg Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
14	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi
15	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pelaksanaan pelatihan
16	Sub keg Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n
17	Sub Keg. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja
18	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Swasta yang dibina
19	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Swasta yang dibina
20	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR
21	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Besaran pemeriksaan perusahaan
22	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan
23	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek
24	Sub keg Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
25	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase fasilitasi pembangunan kawasan transmigrasi
26	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen kelayakan lingkungan dan pemukiman transmigrasi
27	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)
28	sub keg Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan
29	sub keg Pelatihan transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan
30	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase kawasan transmigrasi yg dikembangkan
31	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Satuan Permukiman yang dibina
32	Sub keg Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina
33	Sub keg Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan
34	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
35	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR
		Perangkat Daerah
36	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
37	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
38	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
39	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
40	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
41	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
42	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
43	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
44	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
45	Kegiatan:Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah
46	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
47	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu
48	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
49	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
50	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
51	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
52	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR
53	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
54	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
55	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
56	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
57	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
58	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Untuk tahun 2025 ditetapkan program, kegiatan, dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut membutuhkan anggaran sebesar **Rp 10.599.892.000,00**. Program, kegiatan berikut pendanaannya kami sajikan dalam Tabel C29 berikut.

Tabel T-C.33  
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025  
DAN PRA KIRAAN MAJU TAHUN 2026  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, PROVINSI SULAWESI SELATAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>				10.599.892.000				10.599.892.000
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	Kab Sidrap	7,30	30.000.000	APBD KAB		7,50	30.000.000
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang diawasi	Kab Sidrap	38,00	30.000.000	APBD KAB		40,00	30.000.000

	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Sidrap	25,00	30.000.000	APBD KAB		30,00	30.000.000
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi aktif	Kab Sidrap	10,66	20.000.000	APBD KAB		10,67	20.000.000
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Kegiatan Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anggota koperasi yang dilatih	Kab Sidrap	6,80	20.000.000	APBD KAB		6,90	20.000.000
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Sub keg Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kab Sidrap	20,00	20.000.000,00	APBD KAB		25,00	20.000.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	Kab Sidrap	55,00	640.000.000	APBD KAB		60,00	640.000.000

	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase usaha mikro yang diberdayakan	Kab Sidrap	1,25	640.000.000	APBD KAB		1,25	640.000.000
	Sub keg Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Kab Sidrap	25,00	200.000.000	APBD KAB		25,00	200.000.000
	Sub keg Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Kab Sidrap	100,00	440.000.000	APBD KAB		100,00	440.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat volume usahanya setelah difasilitasi pengembangan	Kab Sidrap	3,00	1.700.000.000	APBD KAB		3,50	1.700.000.000
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang difasilitasi pengembangan	Kab Sidrap	1,40	1.700.000.000	APBD KAB		1,40	1.700.000.000

	Sub keg Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab Sidrap	30,00	1.000.000.000	APBD KAB		30,00	1.000.000.000
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Kab Sidrap	29,00	1.200.000.000	APBD KAB		30,00	1.200.000.000
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pelaksanaan pelatihan	Kab Sidrap	16,00	800.000.000	APBD KAB		16,00	800.000.000
	Sub keg Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Kab Sidrap	330,00	750.000.000	APBD KAB		330,00	750.000.000
	Sub Keg. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Kab Sidrap	1,00	50.000.000	APBD KAB		1,00	50.000.000
	Kegiatan Pemnbinan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Swasta yang dibina	Kab Sidrap	10,20	400.000.000	APBD KAB		10,20	400.000.000

	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Swasta yang dibina	Kab Sidrap	10,00	400.000.000	APBD KAB		10,00	400.000.000
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	Kab Sidrap	4,55	1.295.000.000	APBD KAB		4,60	1.295.000.000
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Besaran pemeriksaan perusahaan	Kab Sidrap	0,45	20.000.000	APBD KAB		0,50	20.000.000
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kab Sidrap	20,00	20.000.000,00	APBD KAB		30,00	20.000.000,00
	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	Kab Sidrap	28,20	1.275.000.000	APBD KAB		28,50	1.275.000.000

	Sub keg Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab Sidrap	7.199,00	1.275.000.000	APBD KAB		7.199,00	1.275.000.000
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase fasilitasi pembangunan kawasan transmigrasi	Kab Sidrap	100,00	180.000.000	APBD KAB		100,00	180.000.000
	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen kelayakan lingkungan dan pemukiman transmigrasi	Kab Sidrap	20,00	180.000.000	APBD KAB		20,00	180.000.000
	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	Kab Sidrap	1,00	100.000.000,00	APBD KAB		1,00	100.000.000,00
	sub keg Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Kab Sidrap	20,00	30.000.000	APBD KAB		20,00	30.000.000
	sub keg Pelatihan transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Kab Sidrap	15,00	50.000.000	APBD KAB		15,00	50.000.000

	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase kawasan transmigrasi yg dikembangkan	Kab Sidrap	100,00	20.000.000	APBD KAB		100,00	20.000.000
	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Satuan Permukiman yang dibina	Kab Sidrap	4,00	20.000.000	APBD KAB		4,00	20.000.000
	Sub keg Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kab Sidrap	10,00	10.000.000,00	APBD KAB		10,00	10.000.000,00
	Sub keg Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Kab Sidrap	1,00	10.000.000,00	APBD KAB		1,00	10.000.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Sidrap	100,00	3.814.892.000	APBD KAB		100,00	3.814.892.000
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Sidrap	100,00	14.000.000	APBD KAB		100,00	14.000.000

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Sidrap	3,00	7.000.000	APBD KAB		3,00	7.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Sidrap	3,00	7.000.000	APBD KAB		3,00	7.000.000
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Sidrap	100,00	3.247.392.000	APBD KAB		100,00	3.247.392.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Sidrap	33,00	3.234.392.000	APBD KAB		33,00	3.234.392.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab Sidrap	230,00	8.000.000	APBD KAB		230,00	8.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab Sidrap	17,00	5.000.000	APBD KAB		17,00	5.000.000
	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab Sidrap	100,00	9.000.000	APBD KAB		100,00	9.000.000

	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab Sidrap	33,00	5.000.000	APBD KAB		33,00	5.000.000
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab Sidrap	33,00	4.000.000	APBD KAB		33,00	4.000.000
	Kegiatan:Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Sidrap	100,00	106.500.000	APBD KAB		100,00	106.500.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab Sidrap	17,00	1.500.000	APBD KAB		17,00	1.500.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Sidrap	200,00	5.000.000	APBD KAB		200,00	5.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Sidrap	60,00	100.000.000	APBD KAB		65,00	100.000.000
	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Sidrap	100,00	45.000.000	APBD KAB		100,00	45.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab Sidrap	4,00	30.000.000	APBD KAB		4,00	30.000.000

	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab Sidrap	3,00	15.000.000	APBD KAB		3,00	15.000.000
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab Sidrap	100,00	267.000.000	APBD KAB		100,00	267.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab Sidrap	12,00	90.000.000	APBD KAB		12,00	90.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12,00	177.000.000			12,00	177.000.000
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00	126.000.000			100,00	126.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		12,00	96.000.000			12,00	96.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		18,00	15.000.000			18,00	15.000.000

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1,00	15.000.000			1,00	15.000.000
--	--	--	--	------	------------	--	--	------	------------

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan Referensi (Undang-Undang/Peraturan), Renstra, dan keterpaduan Top Down Planning (Konsultatif) dan Bottom Up Planning (Definitif) melalui Musrenbang dan Kebutuhan Organisasi sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang serta menselaraskan dan mensinergikan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Dalam rangka pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, ketenagakerjaan, dan transmigrasi di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi perlu mendapat perhatian khusus jika sekiranya ketersediaan anggaran cukup demi untuk pelaksanaan Program/kegiatan tahun 2025.

Demikianlah Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi disusun sebagai acuan aparat dalam pelaksanaan Program/Kegiatan untuk mencapai tujuan bersama.

Pangkajene Sidenreng, 21 Agustus 2024

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM,  
TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,



**DR. MUH. ROHADY RAMADHAN, S.I.P.M.Si.CGCAE**

NIP. 19710318 199101 1 003

